

Lihat tinjauan program dukungan bantuan Bank Dunia, halaman 10.

UNMISSET dan Keamanan Dalam Negeri di Timor Lorosa'e

Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama di Timor Lorosa'e (UNAMET) tiba pada bulan Mei tahun 1999. Sejak saat itu PBB telah mengirim dua Misi lainnya yaitu UNTAET dan saat ini UNMISSET. Setiap Misi mempunyai mandat dan tujuannya sendiri:

- **UNAMET – Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosa'e berlangsung sejak bulan Mei sampai Oktober 1999.** Misi PBB pertama di Timor Lorosa'e untuk mengatur dan melaksanakan jajak pendapat, dimana hasilnya masyarakat Lorosa'e memilih kemerdekaan.
- **UNTAET – Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosa'e berlangsung sejak bulan Oktober 1999 sampai Mei 2002.** Setelah jajak pendapat dan kekerasan yang menandai pemilihan tersebut, UNAMET diganti dengan UNTAET yang mempunyai mandat untuk menjalankan pemerintahan sampai Timor Lorosa'e dapat memiliki pemerintahannya sendiri. Sebagai sebuah pemerintahan transisi, UNTAET mempunyai kedaulatan dan kekuasaan penuh untuk mengatur Timor Lorosa'e dalam segala hal, tanpa pertanggung jawaban lokal. (*Lihat Buletin LH Vol. 2, no.1-2; Vol.2, no. 4; Vol. 2, no. 6-7; Vol. 3, no.1*).
- **UNMISSET – Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosa'e berlangsung sejak bulan Mei 2002 sampai Juni 2004.** pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Lorosa'e secara resmi menjadi negara merdeka yang memiliki pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu UNTAET diganti dengan UNMISSET dengan mandat untuk

memberikan dukungan kepada pemerintah yang baru sampai bulan Mei 2004 dan mendukung stabilitas dan keamanan jangka panjang negara Timor Lorosa'e.

Setelah hampir satu tahun kehadiran UNMISSET di Timor Lorosa'e, masih banyak yang tidak mengerti apa itu UNMISSET atau apa isi mandatnya serta tanggung jawabnya. Artikel ini akan mencoba untuk mengklarifikasi beberapa pertanyaan mengenai UNMISSET, khususnya menyangkut tanggung jawabnya terhadap keamanan dalam negeri Timor Lorosa'e.

Mandat UNMISSET

Resolusi nomor 1410 Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2002, memberikan kuasa pembentukan UNMISSET untuk periode awal selama satu tahun. UNMISSET mempunyai tiga tugas utama:

- √ “untuk menyediakan bantuan bagi struktur administrasi utama yang diperlukan demi stabilitas kelangsungan hidup dan politik Timor Lorosa'e.”
- √ “untuk menyediakan penegakan hukum sementara dan keamanan umum serta membantu mengembangkan sebuah lembaga penegakan hukum baru di Timor Lorosa'e dan, Polisi Nasional Timor Lorosa'e.”
- √ “untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan di dalam dan diluar negara Timor Lorosa'e.”

UNMISSET mempunyai suatu Rencana Pelaksanaan Mandat yang terdiri dari tiga program:

1. Stabilitas, Demokrasi dan Keadilan
2. Keamanan Umum dan Penegakan Hukum
3. Keamanan Luar Negeri dan Pengawasan Perbatasan

Misi ini dipimpin oleh Wakil Khusus Sekretaris Jendral PBB (SRSG), Kamallesh Sharma seorang diplomat berkebangsaan India, dan seorang wakilnya yakni Sukehiro Hasegawa berkebangsaan Jepang, yang juga merupakan pimpinan

(Bersambung ke halaman 2)



Rumah kediaman Perdana Menteri Mari Alkatiri setelah kerusuhan tanggal 4 Desember 2002

Daftar isi . . .

Lokakarya tentang Tujuan Pembangunan Milenium..	9
Program Dukungan Transisional Bank Dunia	10
Diagram mengenai Dari Mana Timor Lorosa'e Memperoleh Uang	12
Editorial: Tidak Ada Perdamaian Tanpa Keadilan ...	16

La'ó Hamutuk, Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa'e
P.O. Box 340, Dili, East Timor (via Darwin, Australia)

Mobile: +670-723-4330; Telepon: +670(390)325-013

Email: laohamutuk@easttimor.minihub.org Situs/Web: <http://www.etan.org/lh>

Tabel 1
Kekuatan maksimum UNMISSET yang perbolehkan

Staf sipil:	455 staf internasional
	977 staf nasional
	241 sukarelawan PBB
Polisi	1250 polisi
Militer	5000 personel militer (termasuk 120 pengamat militer)

UNDP di Timor Lorosa'e. UNMISSET terdiri dari komponen sipil termasuk kantor SRSG, Kelompok Pendukung Sipil (penasehat teknis untuk pemerintah Timor Lorosa'e), Unit Kejahatan Berat dan Bagian Hak Asasi Manusia juga termasuk komponen polisi sipil dan militer (*lihat tabel 1*).

Menurut Laporan Sekretaris Jendral pada bulan Desember 2002 mengenai anggaran belanja UNMISSET untuk bulan Juli 2003 sampai Juni 2004, anggaran belanja UNMISSET untuk dua tahun sekitar US\$517 juta. Sekitar 62% dari anggaran ini dialokasikan untuk gaji dan pengeluaran pribadi lainnya, dan 22% dibelanjakan untuk staf sipil. Walaupun jumlah staf lokal hampir dua kali lipat dari staf internasional, dan hanya 0.8% dari anggaran (3% dari uang personil sipil) untuk membayar staf lokal (*lihat grafik 1*).

Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum

Artikel ini akan menitikberatkan pada Mandat UNMISSET dalam bidang Keamanan Dalam Negeri dan Penegakan Hukum, yang berbunyi UNMISSET bertanggung jawab atas "proses penegakan hukum sementara dan keamanan umum serta membantu mengembangkan lembaga penegak hukum di Timor Lorosa'e, Polisi Nasional Timor Lorosa'e" dan "untuk membantu pertahanan keamanan di dalam dan luar negara Timor Lorosa'e." Jadi kami akan mengkaji terutama mengenai mandat dan pelaksanaan dari polisi internasional, dan bukan militer.

Berdasarkan Mandatnya, program ini mempunyai dua tujuan:

- 1 "untuk melanjutkan penyediaan kepolisian eksekutif"
- 2 "untuk mendukung pengembangan lembaga kepolisian nasional melalui pelatihan, penempatan bersama dan tepat waktu dan koordinasi penyerahan tanggung jawab."

Apa maksud dari keseluruhan program ini? Pertama adalah bahwa UNMISSET melalui komponen polisi UNPOL akan menyediakan pelayanan kepolisian sampai polisi nasional benar-benar siap melaksanakan tugas kepolisiannya. Kedua, UNMISSET mempunyai tanggung jawab untuk melatih dan menyiapkan pasukan polisi nasional – Polisi Nasional de Timor Lorosa'e (PNTL) – sebagai pasukan polisi yang profesional, demokratis, efisien, berkelanjutan dan memasyarakat berdasarkan pada kekuatan kepolisian. UNMISSET mempunyai tanggung jawab penuh atas keamanan di Timor Lorosa'e dengan Komisaris UNPOL dan SRSG sebagai pengambil keputusan utama di negara ini mengenai masalah keamanan sampai saat tanggung jawab operasional secara penuh diserahkan kepada penguasa Timor Lorosa'e. "Sampai dengan saat itu, mereka [polisi nasional] akan tetap dibawah kepemimpinan komisaris polisi internasional yang memberikan laporan kepada Wakil Khusus saya", menurut Rencana Pelaksanaan Mandat tersebut.

Komponen UNPOL di Timor Lorosa'e

Berdasarkan Mandat UNMISSET, "program yang akan dilaksanakan oleh komponen polisi UNMISSET, dibantu oleh sejumlah ahli sipil." Ketika Misi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 2002, komponen UNPOL berjumlah 1.250 orang dibagi ke 13 kabupaten di Timor Lorosa'e. Menindaklanjuti perintah Mandat bahwa "pengurangan UNMISSET seharusnya dilaksanakan secepat mungkin, setelah penilaian secara teliti mengenai keadaan di lapangan," jumlah ini telah dikurangi secara bertahap sesuai dengan rencana yang dirancang pada awal Misi. Sejak bulan Maret 2003, kesatuan UNPOL di Timor Lorosa'e berjumlah 622 orang (*lihat tabel 2*).

Pelatihan dan Pengembangan Polisi Nasional

Pasukan Polisi Nasional Timor Lorosa'e, PNTL, dibentuk pada tanggal 27 Maret 2000 dengan jumlah 50 orang tenaga baru. Calon polisi direkrut dan diseleksi oleh UNPOL di Dili dan di seluruh kabupaten serta proses rekrutmen didasarkan pada persyaratan internasional seperti tinggi badan (paling sedikit 155 cm untuk perempuan dan 165 cm untuk laki-laki) dan para calon polisi harus lulus tes kesehatan dan tes lainnya. Dalam test itu tidak dilihat apakah seorang calon

Grafik 1: Pengeluaran UNMISSET untuk tahun 2002-2004
(\$17 juta untuk misi selama dua tahun)

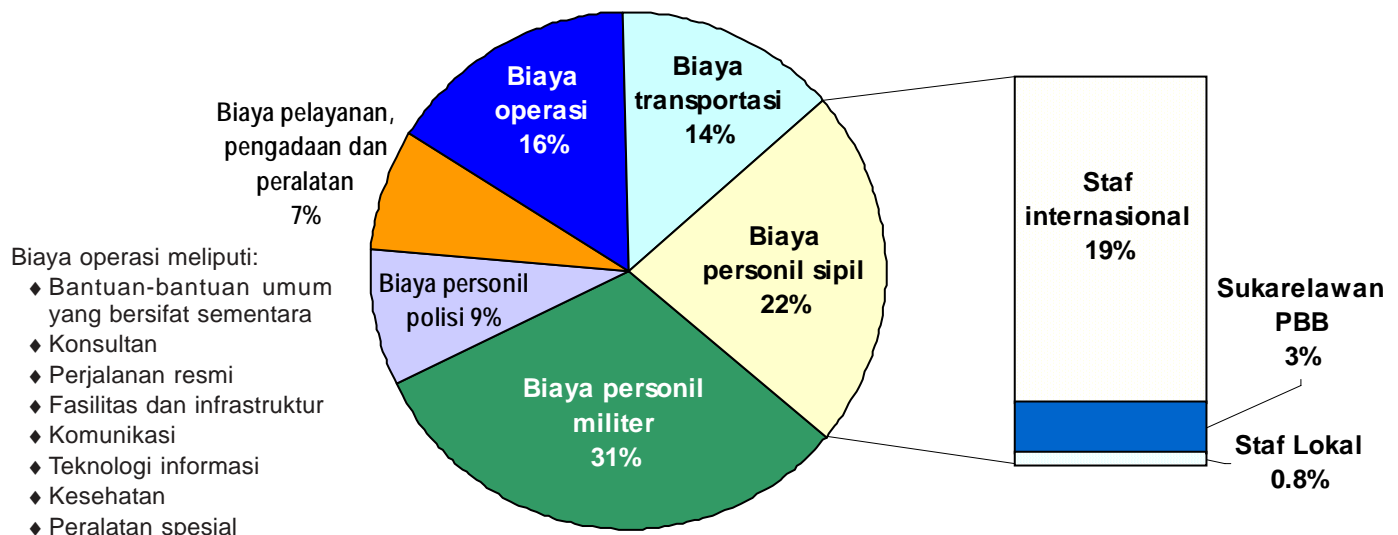
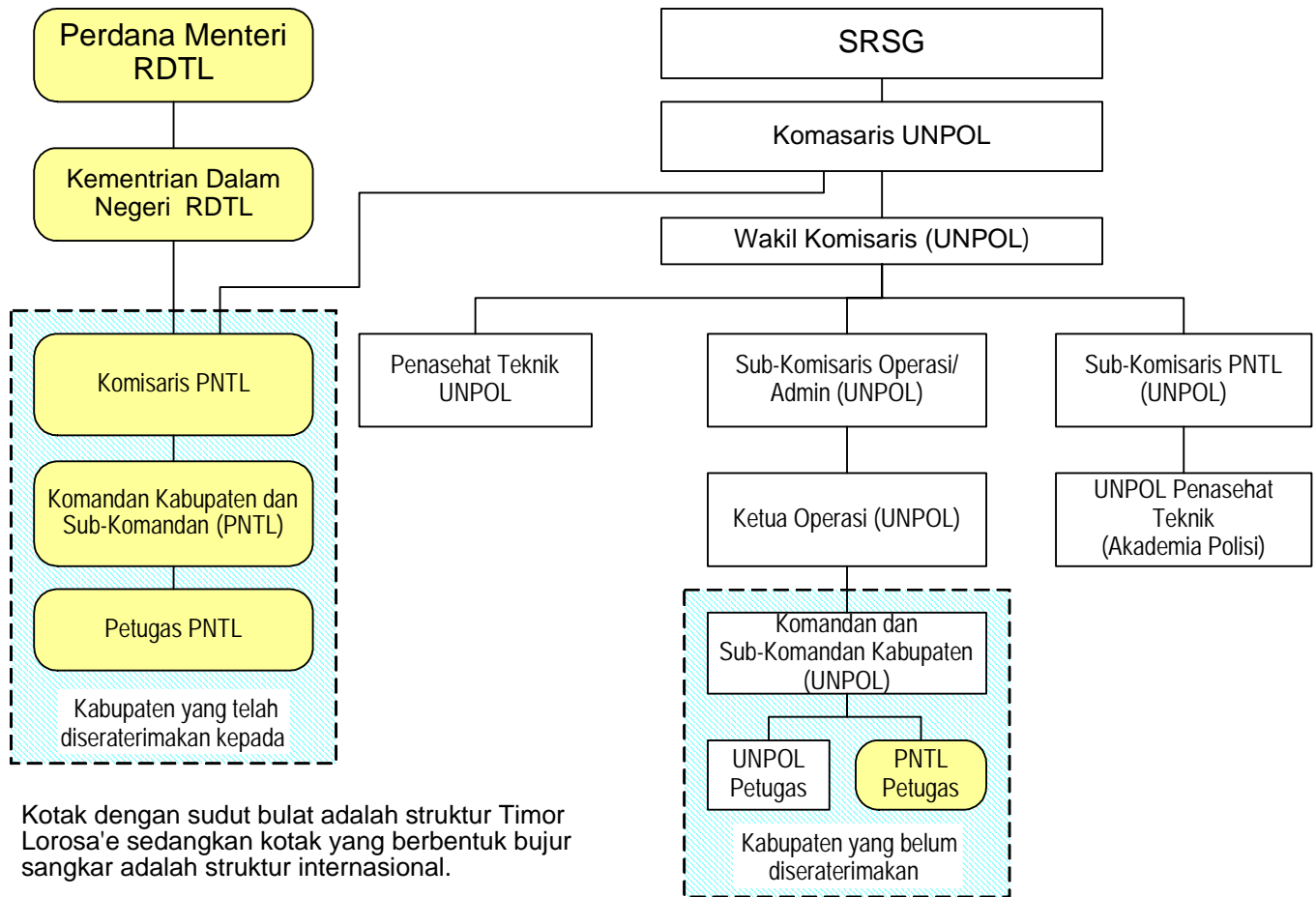


Diagram 1: Struktur organisasi polisi (dalam kotak sudah diterjemahkan)



sebelumnya adalah dari kelompok pro-otonomi atau pro-kemerdekaan sehingga menimbulkan protes dari kelompok-kelompok masyarakat sipil Timor Lorosa'e. Polisi Timor Lorosa'e saat ini berjumlah 2.530 orang, dan 253 orang yang baru diterima sudah menjalani permulaan pelatihan di Akademi Kepolisian pada tanggal 31 Maret 2003.

Seperti telah disebut di atas bahwa salah satu tujuan UNPOL di Timor Lorosa'e adalah untuk melatih pasukan polisi nasional dan menyiapkannya untuk mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas keamanan dalam negeri setelah tugas UNMISSET berakhir.

- Pelatihan untuk Polisi Nasional Timor Lorosa'e terdiri dari:
- √ Pelatihan Dasar: tiga bulan pelatihan teori di Akademi Kepolisian
 - √ Pelatihan Lapangan: sembilan bulan pelatihan "on the job" (di lapangan)
 - √ Pelatihan Keahlian: seperti pencarian bom, penyelidikan dan intelijen dasar
 - √ Pelatihan Khusus: disediakan untuk bagian-bagian khusus seperti UIR (*Rapid Intervention Unit - Unit Penanganan Cepat*) dan VPU (*Victim Protection Unit - Unit Perlindungan Korban*)
 - √ Kursus Profesional: manajemen dan administrasi.

Akademi Kepolisian

Para calon yang terpilih harus mengikuti pelatihan dasar selama tiga bulan di Akademi Kepolisian dimana mereka belajar teori dan menjadi biasa dengan pekerjaan polisi. Program pelatihannya disiapkan oleh PBB yang meliputi 54 mata pelajaran serta ujian setiap bulan. Banyak rekrutan polisi nasional yang hanya berpendidikan sampai SMP sehingga kadang-kadang mereka mengalami kesulitan memahami seluruh materi yang disiapkan dalam jangka waktu yang singkat.

Semua pejabat yang diwawancarai oleh *La'o Hamutuk* setuju bahwa pelatihan dasar yang disediakan untuk PNTL tidak cukup untuk menyiapkan sebuah pasukan polisi profesional dan waktu tiga bulan adalah waktu yang sangat singkat. Misi Penilaian Bersama untuk Pasukan Polisi Timor Lorosa'e yang diselenggarakan pada tanggal 18-29 Novem-

Tabel 2: Personel UNPOL

KABUPATEN	UNPOL
Dili	482
Baucau	58
Aileu	3
Manatuto	4
Viqueque	24
Bobonaro	36
Liquisa	5
Oecussi	30
Manufahi	4
Covalima	38
Ermera	11
Ainaro	4
Lautem	17
Jumlah	662

Sumber: UNMISSET, Maret 2003

ber 2002, mengakui dalam Aide-Memoire (Catatan Peringatannya): “Semua rekrut TLPS [sekarang PNTL] menerima dua belas minggu pelatihan khusus sebagai tambahan untuk pelatihan lapangannya. Namun, secara luas diakui bahwa ini tidak cukup dan pelatihan selanjutnya dibutuhkan untuk menguatkan ketrampilan dasar kepolisian.”

UNPOL mengatakan bahwa periode waktu untuk pelatihan terbatas karena hanya mempunyai waktu dua tahun untuk menyiapkan 2.830 petugas polisi nasional Timor Lorosa’e, dan menghadapi tekanan waktu agar mencapai tujuan yang tinggi untuk jumlah tenaga baru yang harus dilatih. Namun, pelatihan untuk para Polisi Nasional Timor Lorosa’e tidak dimulai pada saat UNMISSET, tetapi selama Misi UNAMET, pada awal tahun 2000. Ketika UNMISSET mulai bertugas pada bulan Mei 2002, polisi Timor Lorosa’e sudah mempunyai sekitar 1.800 petugas (*lihat grafik 2 pada halaman 7*). Hal ini berarti bahwa, selama dua tahun mandatnya, UNMISSET harus melatih sekitar 1.000 petugas, bukan 2.800.

La’o Hamutuk baru saja menerima informasi bahwa kurikulum baru enam bulan pelatihan dasar telah dikembangkan dan akan dilaksanakan segera sebelum Misi berakhir. Dengan kurikulum baru, waktu untuk pelatihan menjadi satu tahun, yang terbagi atas enam bulan pelatihan dasar dan enam bulan pelatihan lapangan. Tetapi hingga saat ini, lima bulan setelah Misi Bersama membuat rekomendasinya, para tenaga baru PNTL masih tetap menerima pelatihan dasar tiga bulan.

Sampai dengan bulan Mei 2002, pelatihan di Akademi Polisi diberikan secara keseluruhan oleh para petugas UNPOL dan para ahli internasional. Selama periode ini, selain jangka waktu yang singkat, komunikasi merupakan masalah lain di Akademi. Kebanyakan petugas UNPOL yang memberikan pelatihan menggunakan bahasa Inggris, yang kebanyakan para tenaga baru PNTL tidak mengerti. Menurut salah satu penasihat teknik UNPOL, dan juga para petugas PNTL yang diwawancarai oleh *La’o Hamutuk* di Akademi Polisi, proses terjemahan mengurangi waktu pelatihan, bagian lain dari kenyataan adalah banyak kasus terjemahan yang tidak tepat.

Setelah kemerdekaan, perwira PNTL mulai memberikan pelatihan dasar dan kemudian hari wewenang atas Akademi kepolisian diserahkan kepada polisi Timor, sesuai dengan rencana PBB. Para petugas UNPOL di Akademi saat ini adalah penasihat teknis, yang berperan sebagai Penasihat, memantau kelas-kelas, membantu dengan administrasi dan memberikan bantuan bila diperlukan. Mereka juga menyiapkan para pelatih PNTL dan, bersama dengan para ahli internasional, menyediakan pelatihan khusus mengenai skenario-skenario, hak asasi manusia, manajemen dan topik-topik lain. Pada saat ini terdapat 44 pelatih PNTL dan 31

Tabel 3
32 Negara yang mengirim
741 polisi

Amerika Serikat	58
Argentina	9
Australia	58
Bangladesh	25
Bosnia dan Herzegovina	10
Brazil	9
Chile	6
Cina	76
Filipina	74
Ghana	69
Inggris	12
Jordania	40
Kanada	20
Malaysia	44
Mesir	12
Mozambique	6
Nepal	35
Niger	3
Norwegia	4
Pakistan	9
Portugal	14
Rusia	5
Samoa	2
Singapura	25
Slovenia	2
Spanyol	5
Sri Lanka	38
Swedia	10
Thailand	36
Turki	11
Ukrainia	7
Zambia	7
Jumlah	741

*Sumber: Laporan SG tentang UNMISSET
tanggal 6 November 2002*

penasihat teknik UNPOL di Akademi Polisi.

Pelatihan Lapangan dan Kepolisian Eksekutif

Tujuan pertama program Keamanan Dalam Negeri dan Penegakan Hukum adalah untuk “tetap menyediakan kepolisian eksekutif.” Sejak berdirinya pasukan polisi nasional, kepolisian eksekutif di Timor Lorosa’e telah berfungsi sebagai suatu “pelayanan bersama”, disediakan oleh UNPOL dan PNTL, dibawah pimpinan Komisaris UNPOL yang membuat laporan kepada SRSG di Timor Lorosa’e. Sembilan bulan pertama “pelayanan bersama,” setelah lulus dari Akademi Kepolisian disebut juga “pelatihan lapangan” atau “pelatihan/pelajaran sambil kerja”.

Setelah menyelesaikan pelatihan dasar, para lulusan Akademi Kepolisian kembali ke asal dimana mereka terpilih, untuk menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari di Akademi. Selama periode ini, lulusan PNTL bekerja bersama dengan seorang rekan UNPOL. Setelah menyelesaikan pelatihan lapangan, para lulusan menjalani tes dan di evaluasi untuk menjadi petugas polisi profesional. Tetapi sampai dengan kabupaten dimana mereka bekerja telah diserahkan kepada komando PNTL, mereka tetap bekerja dengan rekan UNPOLnya dalam pelayanan bersama ini.

Menurut Wakil Komisaris UNPOL Denis McDermott, prioritas UNPOL di Timor Lorosa’e berubah tergantung konteks dan perkembangan keadaan.

Pelayanan polisi adalah bagian dari misi UNPOL tetapi dengan perkembangan polisi nasional PNTL biasanya mengutamakan operasi harian, sementara UNPOL sekarang berperan sebagai pemantau dan penasihat, yang menitikberatkan kegiatannya pada pelatihan dan penyelidikan.

“Pelatihan Lapangan” dan “pelayanan bersama” yang telah dijelaskan diatas telah mengalami beberapa masalah dan kesulitan:

1. Kekurangan Pemahaman Berbahasa: kebanyakan petugas UNPOL yang bekerja sebagai rekan kerja PNTL tidak berbicara bahasa Tetun atau Indonesia, dan kebanyakan petugas PNTL tidak berbicara bahasa Inggris. Hal ini membuat komunikasi menjadi sulit antara orang Timor Lorosa’e dan rekan kerjanya, walaupun penterjemah disediakan dalam beberapa kasus, khususnya di beberapa pos kepolisian. Tetapi dalam tugas kepolisian sehari-hari, ketika para petugas PNTL dan UNPOL sedang bekerja sama di lapangan, biasanya tidak ada orang yang dapat menjadi jembatan komunikasi diantara mereka. Kebanyakan petugas PNTL yang diwawancarai oleh *La’o Hamutuk* menyatakan bahwa komunikasi adalah sebuah masalah besar, terutama di lapangan.

2. Pengetahuan yang Tidak Cukup mengenai Budaya Lokal:

beberapa petugas PNTL dan UNPOL yang diwawancarai oleh *La'o Hamutuk* menyatakan bahwa para petugas UNPOL mempunyai kekurangan pengetahuan mengenai budaya lokal, sehingga ada kemungkinan dapat menimbulkan masalah dalam menjalankan tugas kepolisian di lapangan. Hal ini juga diakui oleh Misi Penilaian Bersama mengenai PNTL, yang tertulis dalam laporannya bahwa “kekurangan beberapa staf UNPOL dalam hal bahasa dan budaya telah menghambat efektifnya beberapa bantuan teknik.”

3. Metode: tiga bulan pertama pelatihan di Akademi Kepolisian, walaupun diberikan oleh petugas UNPOL atau PNTL, tetap mengikuti sebuah kurikulum yang telah disiapkan oleh PBB. Tetapi ketika para petugas PNTL mengikuti pelatihan lapangan, mereka bekerja dengan para petugas internasional dari seluruh dunia (*lihat tabel 3*), dimana masing-masing petugas UNPOL menggunakan metode dan menerapkan teori dalam prakteknya mereka sendiri. Hal ini membuat bingung para petugas Timor Lorosa'e yang baru, yang melihat perbedaan contoh-contoh pelaksanaan dari apa yang telah mereka pelajari di Akademi. Pada kenyataannya, perbedaan-perbedaan ini seringkali menimbulkan masalah bahkan di sebagian besar petugas UNPOL yang bekerja sama.

Dukungan Bantuan PKF

Pasukan Pertahanan Keamanan (PKF, komponen militer UNMISSET) mempunyai, sebuah tugas kedua, untuk menyediakan dukungan kepada polisi “pada kejadian keamanan dalam negeri berskala besar yang melebihi kemampuan polisi”. Dukungan biasanya dimulai dengan sebuah permohonan dari Komandan kabupaten kepada Komisaris UNPOL, tetapi SRSG (wakil khusus sekjen PBB) harus membuat sebuah permohonan resmi kepada Komandan Pasukan PKF.

Menurut Laporan mengenai UNMISSET yang ditulis oleh Sekretaris Jendral PBB pada bulan November 2002 telah terjadi empat peristiwa kekerasan yang melibatkan gerombolan (pengacau) keamanan sehingga UNPOL membutuhkan dukungan dari PKF untuk mempertahankan ketertiban. Setelah laporan tersebut, polisi telah mengajukan permohonan dukungan dari PKF paling tidak sebanyak tiga kali lagi: selama gangguan sipil di Dili pada tanggal 4 Desember 2002, dan dua kejadian bersenjata di Atsabe dan Atabae, pada bulan Januari dan Februari 2003.

Penggunaan dukungan militer untuk menangani urusan keamanan dalam negeri adalah sangat menimbulkan persoalan. Walaupun dalam kasus ancaman berat terhadap keamanan memang diperlukan, seharusnya dihindari sebanyak mungkin, serta batas dan perannya harus sangat jelas. Dapat dikatakan, dukungan ini merupakan dukungan yang diberikan kepada pasukan polisi untuk mengembalikan ketertiban dan menciptakan keamanan, tetapi tanggung jawab untuk pengawasan keamanan dalam negeri berada pada satuan kepolisian.

Kebingungan mengenai peran polisi dan militer bukan hanya masalah penggunaan dukungan militer untuk persoalan keamanan dalam negeri. Militer tidak dilatih untuk menangani para penduduk sipil. Mereka dilatih untuk berperang, mengambil tindakan melawan prajurit musuh, dan biasanya untuk membunuh. Untuk melibatkan tentara dalam gangguan sipil atau masalah sipil dapat membahayakan, dan

adalah sebuah contoh buruk bagi sebuah negara yang sedang mengembangkan demokrasi baru. UNPOL telah memohon dukungan PKF tujuh kali selama sepuluh bulan, suatu jumlah yang tinggi di negara manapun.

Ada beberapa pendapat, baik di dalam PKF sendiri, bahwa PKF sedang melakukan tugas polisi diberbagai tempat, seperti Dili, karena polisi tidak mampu melaksanakan tugasnya sendiri. Dalam banyak kasus, saat kejadian tanggal 4 Desember, masyarakat mengharapkan PKF mengambil tindakan, yang menunjukkan bahwa peran UNPOL dan PKF tidak jelas bagi masyarakat, terutama pada kasus-kasus gangguan sipil. Kenyataan bahwa rakyat begitu sering melihat PKF di jalan, semakin membingungkan mereka.

Pertanyaannya adalah: Mengapa UNPOL sering membutuhkan dukungan dari komponen militer di Timor Lorosa'e? Polisi seharusnya lebih siap, dilatih dan memiliki perlengkapanserta mempunyai personel yang cukup untuk memastikan hukum dan keamanan dalam negeri. Kasus-kasus dimana polisi membutuhkan dukungan dari militer seharusnya untuk keadaan yang tidak biasa.

Penyerahan dan Pengurangan

Tanggung jawab operasional sehari-hari dalam kepolisian eksekutif diserahkan kepada Komando Kepolisian Nasional secara perlahan-lahan, kabupaten demi kabupaten, berdasarkan rencana yang disiapkan pada awal Mandat, dengan persetujuan Pemerintahan Transisi. Menurut rencana tersebut, pasukan polisi nasional akan mengambil tanggung jawab penuh atas kepolisian di 13 kabupaten pada bulan Januari 2004, dan UNPOL akan berperan sebagai penasihat teknik. Tujuh dari 13 distrik telah diserahkan kepada komando PNTL (*lihat tabel 4*).

Tabel 4: Serahterima dari UNPOL ke PNTL Yang sudah diserahterimakan

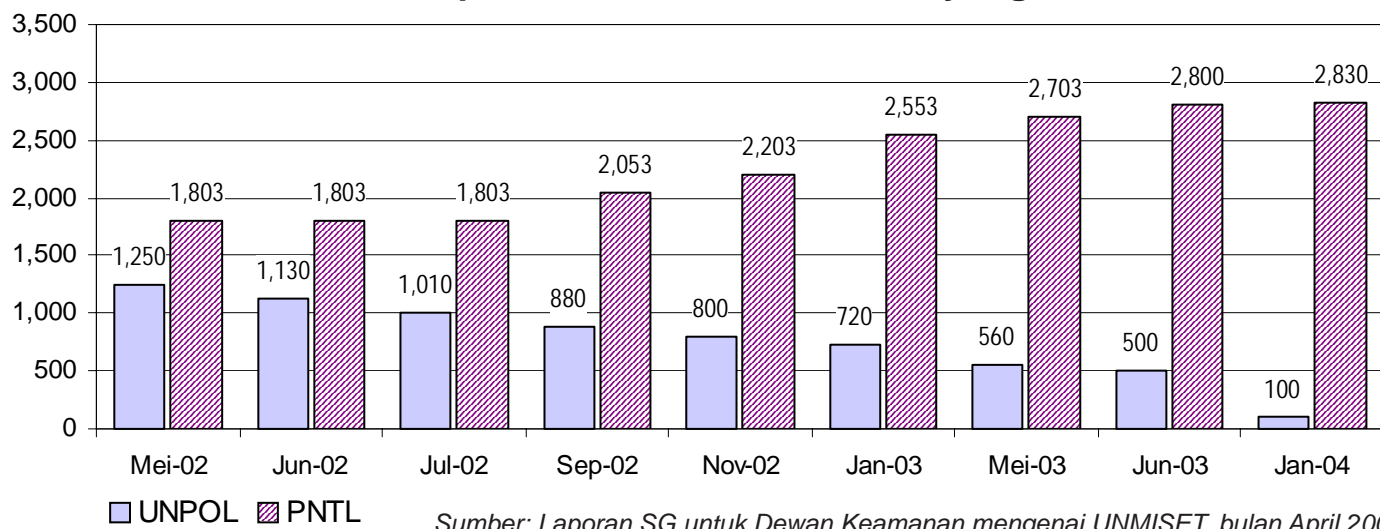
Bulan	Tanggungjawab
Mei 2002	Kabupaten Aileu
Mei 2002	Pelabuhan Dili
Mei 2002	UIR Baucau
Juni 2002	UIR Dili
Juni 2002	Kabupaten Manatuto
Juni 2002	Pengadilan Dili
Sep 2002	Keamanan Akademi Kepolisian
Okt 2002	Kabupaten Manufahi
Nov 2002	Kabupaten Ainaro
Dec 2002	Kabupaten Ermera
Jan 2003	Imigrasi
Jan 2003	Unit Kelautan
Mar 2003	Kabupaten Liquisa
Apr 2003	Kabupaten Lautem
Mei 2003	Kabupaten Viqueque

Rencana penyerahan yang akan datang

Juni 2003	Lapangan udara Dili (Comoro)
Juni 2003	Kabupaten Bobonaro
Juni 2003	Patroli perbatasan
Juni 2003	Kabupaten Covalima
Agu 2003	Kabupaten Oecussi
Sep 2003	Kabupaten Baucau
Nov 2003	Kabupaten Dili
Jan 2004	Mabes Kepolisian Timor Lorosa'e

Sumber: UNMISSET

Grafik 2: Kekuatan pasukan UNPOL dan PNTL yang direncanakan



Sumber: Laporan SG untuk Dewan Keamanan mengenai UNMISSET, bulan April 2002

Dengan penyerahan tersebut, seorang Komandan kabupaten Timor Lorosa'e, yang membuat laporan kepada Komisaris PNTL, menerima tanggung jawab atas kepolisian rutin, tetapi UNPOL tetap mempunyai beberapa personil sebagai penasihat teknik. Kinerja petugas PNTL tetap dinilai oleh kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa yang aktif. Dan sampai dengan bulan Januari 2004, saat tanggung jawab eksekutif dari 13 kabupaten, markas besar dan bagian-bagian khusus akan diserahkan kepada para petugas komandan Timor Lorosa'e. PNTL dan UNPOL berada dibawah pengendalian Komisaris UNPOL, termasuk di kabupaten dimana PNTL bertanggung jawab atas operasi sehari-hari. Seperti yang telah digambarkan dalam persetujuan yang ditandatangani oleh UNMISSET dan Pemerintah RDTL mengenai pengalihan tanggung jawab polisi "Komisaris Timor Lorosa'e akan, setelah penyerahan kabupaten, dengan segera membawa semua persoalan Pimpinan dan Pengendalian Operasi untuk menjadi perhatian Komisaris UNPOL, agar mengambil tindakan yang layak."

Dengan penyerahan tanggung jawab operasi secara bertahap kepada para komandan PNTL, kekuatan UNPOL sudah mulai berkurang secara berangsur-angsur. Rencana pengurangan dirancang berdasarkan rencana penyerahan (lihat grafik 2) dan saat polisi nasional memperkirakan jumlah keseluruhan polisi PBB hanya akan berperan sebagai penasihat, dengan jumlah 100 orang penasihat teknis sampai dengan Juni 2004.

Perencanaan untuk penyerahana tanggung jawab dan pengurangan petugas UNPOL telah dipertanyakan berulang kali, sejak sebagian besar petugas resmi UNPOL yang kami wawancarai menganggap bahwa pelatihan singkat yang diterima Polisi Nasional, bagi beberapa kasus, tidak siap untuk menerima tanggungjawab. Pada November 2002, Misi Penilaian Bersama merekomendasikan bahwa "kemungkinan bahwa waktu yang tepat bagi penyerahan tugas membutuhkan

pertimbangan lebih lanjut baik dari sisi ketrampilan petugas PNTL maupun faktor-faktor politik." Ketika *La'o Hamutuk* mempertanyakan rekomendasi dari Wakil Komisaris UNPOL, dia mengatakan bahwa "agenda penyerahan akan berlanjut sebagaimana telah direncanakan. Kami harus meninggalkan Timor Lorosa'e pada tahun 2004, jadi kami tidak mempunyai waktu untuk menunda penyerahan tanggung jawab kepada PNTL." Walaupun Denis McDermott setuju dengan rencana yang telah dibuat, dia juga mengatakan bahwa dia "sangat menyadari bahwa masih banyak pekerjaan

yang harus diselesaikan saat meninggalkan PNTL dalam posisi untuk mempertahankan hukum dan ketertiban di masa depan."

Tetapi setelah kejadian di Dili, Atsabe dan Atabae (lihat dibawah) telah merubah pikiran para penguasa UNMISSET. Laporan Khusus SRSG yang diajukan kepada Dewan Keamanan pada tanggal 10 Maret, merekomendasikan beberapa perubahan dalam rencana UNMISSET dalam rangka menangani suatu tantangan mengenai keamanan, termasuk bahwa "...jadwal penyerahan kepolisian tidak terlalu cepat sehingga tidak akan membahayakan stabilitas...".

..."

Kejadian di Dili, Atsabe dan Atabae

Telah terjadi tiga kejadian utama yang menyinggung keamanan dalam negeri Timor Lorosa'e beberapa bulan yang lalu.

Pada tanggal 4 Desember, sebuah demonstrasi dilakukan oleh para pelajar di depan Parlemen Nasional yang menentang perlakuan polisi ketika menangkap salah satu teman kelas mereka sehari sebelumnya, telah dimanipulasi dan diarahkan untuk menyerang penandaan target-target khusus Perdana Menteri atau harta benda warga asing. Protes yang berlangsung di depan Parlemen mengakibatkan tiga demonstran telah tewas, menurut laporan polisi PNTL. (lihat *Buletin La'o Hamutuk Vol. 3, no. 8.*)

Sumber Perlengkapan

Ketika berbicara tentang pengembangan institusi-institusi Timor Lorosa'e yang berkelanjutan seperti polisi nasional, kita tidak bisa melupakan bahwa institusi-institusi ini menginginkan persiapan sumber daya manusia yang baik agar menambah sumber perlengkapan yang cukup. PNTL yang sekarang tergantung pada sumber perlengkapan UNPOL seperti komputer, mobil, radio dan keperluan peralatan lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. UNMISSET menyadari bahwa PNTL akan tetap membutuhkan sumber daya ini setelah misinya berakhir. UNPOL telah mengajukan beberapa permohonan kepada UNMISSET agar meninggalkan peralatan-peralatan yang penting untuk PNTL tetapi hal ini belum jelas apakah bisa direalisasikan atau tidak.

Tanggapan polisi yang tidak efektif dalam kasus ini masih belum jelas. Terdapat berbagai pertanyaan yang dipertanyakan: mengapa polisi menembak ke arah massa yang tidak bersenjata? Bagaimana massa dapat berjalan keliling Dili selama beberapa jam, dan hampir di setiap kejadian, polisi baru tiba setelah kerusakan telah terjadi, walaupun mereka memiliki helikopter, kendaraan bermotor dan alat komunikasi yang canggih? Mengapa UIR, unit yang dilatih khusus untuk menangani gangguan sipil, tidak bertindak untuk mengendalikan protes tersebut? Dimanakah UNPOL, sebagai rekan kerja PNTL yang ditugaskan di depan Parlemen? Kenapa petugas UNPOL dan PNTL, ditambah pasukan PKF yang menyediakan dukungan kepada polisi dalam kejadian ini, tidak mampu mengendalikan massa sekitar 200 orang yang tidak bersenjata? Mengapa pasukan PKF melindungi tempat-tempat seperti kedutaan asing dan bangunan PBB, sementara tidak ada satu orangpun., sebagai contoh, melindungi rumah Perdana Menteri, yang merupakan target terakhir penyerangan oleh massa?

Jawaban yang diberikan kepada *La' o Hamutuk* oleh para petugas UNPOL tidak jelas. Pertama dikatakan bahwa polisi tidak dapat mengendalikan massa karena massa menyebar menjadi beberapa kelompok, dan menuju (jalan kaki) ke sasaran yang berbeda-beda pada saat yang bersamaan. Hal ini tetap tidak menjelaskan mengapa, dengan segala peralatan dan personil yang dimiliki oleh UNMISSET, mereka tidak dapat menentukan dimana para kelompok tersebut menuju dan

menghalangi jalan. Juga dikatakan bahwa personil yang ada tidak cukup untuk mengendalikan massa sejumlah 200 orang, dengan menghitung petugas PNTL dan UNPOL yang bermarkas di Dili, ditambah dengan dukungan PKF. Menurut UIR, selain bertugas untuk mengendalikan massa, mereka disebarkan juga untuk melindungi Markas Besar UNPOL dan Pos Polisi Dili. Seorang petugas UNPOL mengatakan kepada kami secara tidak resmi (walaupun atasannya menolak hal ini) bahwa, setelah intervensi UIR dalam berbagai kejadian gangguan sipil di Baucau beberapa bulan sebelumnya, para pemimpin memutuskan untuk “menjaga kesan baik mereka,” dan tidak mengirim mereka ke jalan. Beberapa petugas UNPOL mengatakan kepada kami bahwa “mereka tidak dipersiapkan” untuk menangani kejadian semacam itu, walaupun mereka yang bertanggung jawab atas pertahanan keamanan dalam negara Timor Lorosa'e.

Apa yang jelas adalah bahwa wewenang tanggung jawab ada pada UNMISSET dan UNPOL, yang tidak mengambil tindakan yang efektif, pertama untuk mencegah atau mengendalikan situasi. Mengapa mereka tidak melakukannya, masih belum jelas. Sangat jelas dari Mandat UNMISSET yang sudah disebut berulang kali dalam artikel ini, adalah bahwa PNTL berada dibawah pimpinan UNPOL. Pada tanggal 13 Desember, sembilan hari setelah kejadian, SRSG Kamallesh Sharma menyatakan bahwa “beberapa masalah kedisiplinan jelas terjadi dalam Pelayanan Polisi Nasional de Timor Leste, dan telah diambil langkah-langkah untuk

menanganinya.” Tidak pernah Sharma menyebut siapa yang memimpin PNTL pada hari itu, juga siapa yang bertanggung jawab atas pelatihan mereka. Seperti yang disampaikan seorang pejabat tinggi UNPOL kepada kami, “jika PNTL melakukan kesalahan pada tanggal 4 Desember, hal tersebut merupakan kesalahan banyak orang, dan karena UNPOL yang bertanggung jawab atas pelatihan dan komandonya, mereka yang paling bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya [petugas PNTL].”

Setelah kejadian tersebut, UNPOL melakukan penyelidikan atas penyebab gangguan tersebut dan menyelidiki tingkah laku UNPOL dan PNTL, dan juga tindakan yang diambil oleh petugas PNTL yang terlibat dalam pembunuhan tiga orang demonstran. Pada bulan Februari, Wakil Komisaris UNPOL mengatakan kepada *La' o Hamutuk* bahwa mereka hanya tinggal menunggu hasil dari pemeriksaan uji balistik untuk menyelesaikan penyelidikan, dan bila telah selesai, hasilnya akan diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pada akhir bulan Mei, hampir empat bulan setelah kejadian, hasil penyelidikan belum diumumkan, dan tidak ada yang dituntut.

Namun, menurut para petugas UNPOL, beberapa hal telah berubah setelah tanggal 4 Desember: UIR telah mengikuti pelatihan tambahan untuk ketrampilan pengendalian massa dan penggunaan kekerasan yang layak, dan peralatan baru untuk pengendalian massa diterima dan para petugas telah menerima pelatihan mengenai cara penggunaan alat-alat tersebut. Karena mereka tidak siap dan tidak memiliki peralatan yang memadai untuk mengatasi kejadian tersebut, tetapi saat ini mereka sudah siap.

Dua kejadian lain yang menyangkut keamanan dalam negeri terjadi pada bulan Januari dan Februari dekat Atsabe, kabupaten Ermera dan Atabae, kabupaten Bobonaro, keduanya dekat dengan perbatasan Indonesia. Pada kedua kasus kelompok bersenjata tersebut, mereka menyerang penduduk lokal, tujuh orang meninggal di Atsabe dan dua orang meninggal di Atabae. Motivasi yang jelas mengenai penyerangan tersebut belum diketahui, tetapi, menurut sebuah laporan UNMISSET “terdapat peningkatan jumlah dari bukti yang dapat dipercaya yang menunjuk bahwa ada kemungkinan mantan milisi dan kelompok bersenjata sedang mendirikan markas di dalam negeri dengan tujuan untuk mengganggu stabilitas.”

Baik di Atsabe maupun di Atabae, intervensi militer, PKF dan Pasukan Bersenjata Timor Lorosa'e (FDTL), membuatnya tidak jelas siapa yang bertanggung jawab untuk menangani kasus semacam itu. Menurut Wakil SRSG Hasegawa, persoalan ini adalah masalah keamanan dalam negeri, dan oleh karena itu merupakan tanggung jawab polisi. Tetapi, sekali lagi, polisinya tidak melakukan banyak tindakan. Dalam kasus Atsabe, FDTL yang melakukan penangkapan (kebanyakan ditolak oleh hakim pada keesokan harinya karena tidak sesuai dengan undang-undang) dan sisanya tetap berada di wilayah tersebut, bersama dengan PKF Portugal, menjamin keamanan. Di Atabae terdapat PKF, bukan polisi yang memeriksa wilayah tersebut setelah penyerangan dan

Unit Penanganan Cepat atau UIR

Unit Penanganan Cepat dalam bahasa Portugisnya Unidade Intervenção Rápida adalah unit khusus polisi Timor Lorosa'e yang dilatih untuk menangani kerusakan, masa yang terorganisir dan tidak terorganisir. Ada dua unit intervensi cepat, satu unit berbasis di Dili beranggotakan 130 orang dan satu unit yang lain berbasis di Baucau beranggotakan 160 orang. Anggota UIR direkrut dari polisi yang telah direkrut tetapi sekarang direkrut dari polisi-polisi yang secara sukarela ingin bergabung dengan unit ini. UIR sudah melakukan serahterima kepada PNTL dan unit ini memperoleh latihan diluar Akademi Kepolisian Timor Lorosa'e. Anggota-anggota UIR pertama kali dilatih oleh Korps Intervensi Portugis atau CIP.

menangkap para terdakwa. Dalam kedua kasus tersebut, para penduduk meminta kehadiran FDTL dan PKF, hal ini menunjukkan kekurangan kepercayaan terhadap polisi untuk menjamin keamanan mereka.

Tiga kejadian ini menggambarkan dengan jelas kemampuan UNPOL untuk menjamin keamanan dalam negeri Timor Lorosa'e yang rapuh dan tidak efisien. Dalam laporannya pada bulan Maret 2003, SRSG merekomendasikan beberapa perubahan dalam rencana UNMISSET untuk UNPOL. Laporannya menyatakan bahwa "Kejadian dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa adanya kekurangan keseriusan kemampuan pada pasukan nasional dan internasional, dan dapat menimbulkan lebih banyak masalah." Laporan ini juga mengusulkan agar pembekuan pengurangan UNPOL dan PKF sampai dengan bulan Desember 2003, dan merekomendasikan sebuah revisi strategi bagi pasukan militer dan polisi. Kejadian-kejadian ini membuat penguasa PBB di Timor Lorosa'e menyadari secara resmi masalah-masalah sebelumnya diidentifikasi oleh banyak hal yang lain, termasuk kelemahan pelatihan dan masalah-masalah yang berakar dari penyerahan kabupaten-kabupaten yang terlalu cepat demi pelaksanaan jadwal pengurangan wewenang UNPOL.

Usulan yang disampaikan oleh SRSG termasuk:

- ✓ untuk menyesuaikan komposisi dan kekuatan UNPOL dan jadwal pengurangannya;
- ✓ untuk menyediakan lebih banyak pelatihan kepada PNTL, terutama dalam pengendalian massa;
- ✓ untuk menyertakan sebuah unit polisi internasional khusus untuk keadaan darurat dan gangguan sipil, yang akan bertindak saat situasi yang terjadi diluar kemampuan UIR saat masih dalam pelatihan;
- ✓ untuk meningkatkan pemantauan dan penasihat UNPOL di kabupaten yang telah diserahkan kepada Pemerintah Timor Lorosa'e;
- ✓ untuk menyesuaikan perencanaan penyerahan agar lebih diperlambat.

Rekomendasi-rekomendasi ini telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 5 Mei 2003, sebagai bagian dari Resolusi 1473 (2003).

Kesimpulan

Suatu lingkungan yang stabil dan aman adalah hal yang pokok bagi pembangunan di negara manapun. Dan jelas saat ini bahwa masih banyak masalah yang menyangkut masalah keamanan di Timor Lorosa'e. UNMISSET, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mempertahankan keamanan di Timor Lorosa'e dan membangun struktur yang berkelanjutan bagi masyarakat Timor setelah misinya berakhir, serta untuk memecahkan masalah-masalah ini.

Timor Lorosa'e mempunyai berbagai alasan permasalahan seperti ekonomi, sosial dan sejarah serta khususnya masalah keamanan. Banyaknya pengangguran, kekurangan pendidikan dan pelayanan umum lainnya; terbatasnya saling menghargai antara pemerintah dan masyarakat; keputusan atas langkah-

langkah pembangunan ekonomi dan demokrasi; berkembang luasnya tekanan pasca-konflik dan pasca-trauma; kekurangan kepercayaan terhadap proses perubahan perdamaian. Masalah-masalah ini adalah warisan dari peraturan kolonial selama berabad-abad dan beberapa dekade pendudukan oleh militer. Tiga tahun pemerintahan UNTAET dan satu tahun Misi UNMISSET telah menghasilkan beberapa kemajuan sehubungan dengan masalah-masalah ini, tetapi masih terlalu jauh untuk melangkah dan tanggung jawab masyarakat internasional belum berakhir.

La'o Hamutuk menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan 1473, dimana telah membuat rekomendasi-rekomendasi yang penting mengenai masalah-masalah keamanan. Kami juga berharap bahwa rekomendasi-rekomendasi ini dilaksana-

kan, dan tidak hanya tercantum diatas kertas. Misi Penilaian Bersama telah membuat pendukung rekomendasi yang mirip pada bulan November, tetapi belum banyak yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

Kita tahu bahwa terjaminnya keamanan di Timor Lorosa'e bukan hal yang mudah. Jika tugas UNMISSET berakhir dengan kondisi stabil di Timor Lorosa'e, bagaimanapun, hal ini tidak cukup untuk mengetahui masalah-masalah yang ada hanya di dalam berbagai pertemuan, misi dan laporan. Dalam Misinya harus memiliki komitmen penuh untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah ini, dan membuat menanamkan keseriusannya dalam pelatihan dan persiapan sebuah pasukan polisi nasional yang profesional, serta mampu melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. ❖



Dengar Program Radio La'o Hamutuk

Wawancara dan komentar mengenai isu-isu yang kami investigasi dan isu-isu lainnya dalam bahasa Tetum dan Indonesia:

Setiap Jumad pukul 3.00 sore di Radio Rakambia.

Setiap hari Sabtu pukul 11.00 pagi di Radio Timor Leste dan Radio Timor Kmanek.

CD-ROM tentang Minyak dan Gas

Kami menyediakan situs mengenai minyak dan gas di Laut Timor "Oilweb" dalam CD-ROM. Anda tidak perlu mencari informasi melalui internet tetapi anda bisa memperolehnya dari kantor kami di Farol, di belakang kantor Yayasan HAK. CD-ROM memuat dokumen-dokumen resmi dan hasil analisis tentang minyak dan gas di laut timor dalam bentuk tulisan, film dan drama.

Lokakarya tentang Tujuan Pembangunan Milinium/MDG di Dhaka, Bangladesh

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui agencinya, UNDP mengadakan lokakarya tentang Millennium Development Goals selama tiga hari mulai dari tanggal 23-25 Februari 2003 di Dhaka Bangladesh. Lokakarya ini dihadiri oleh badan-badan PBB, pemerintah Bangladesh, Timor Lorosa'e, Kambojia, Sri Lanka, Malaysia, media internasional dan media local dan kelompok organisasi masyarakat sipil Bangladesh, Iran, Sri Lanka, Malaysia, India dan Timor Lorosa'e.

Sementara itu, delegasi dari Timor Lorosa'e diwakili oleh pejabat senior UNDP Haoliang Xu, wakil khusus UNICEF Joshiro Uramoto, Pemerintah diwakili oleh Wakil menteri keuangan RDTL Aicha Bassarewan dan Penasehat Perdana Menteri untuk Perencanaan nasional Emilia Pires dan Kelompok Masyarakat Sipil diwakili oleh Adriano do Nascimento dari LSM *La'o Hamutuk*.

Lokakarya Dhaka dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan pandangan dan strategi pembangunan negara-negara di wilayah Asia dan Pasifik agar sejalan dengan konsep pembangunan millennium yang dideklarasikan oleh 189 negara dalam Dewan Millenium pada September 2000 di markas PBB, A.S.

Apa itu MDG?

Millennium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Milinium adalah satu kerangka pembangunan global yang dirancang oleh para pemimpin dunia sebagai jawaban atas persoalan kemanusiaan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya dengan komitmen bersama, tujuan dan target mengenai pembangunan, pemerintahan, perdamaian, keamanan dan hak asasi manusia.

Dalam deklarasi millennium itu, 189 pemimpin negara dan pemerintah mengadopsi delapan tujuan pembangunan sebagai kerangka pembangunan millennium seperti

- 1) Mengentaskan Kemiskinan dan Kelaparan
- 2) Memperoleh Pendidikan Dasar Universal
- 3) Mempromosikan Gender dan memperdaya Wanita
- 4) Mengurangi Kematian Bayi
- 5) Memperbaiki Kesehatan Ibu
- 6) Membasmi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit yang lainnya
- 7) Menjamin Keberlangsungan Lingkungan Hidup
- 8) Membangun Mitra Global untuk pembangunan.

Kedelapan kerangka pembangunan ini difokuskan pada usaha-usaha perbaikan dan pencapaian kehidupan masyarakat dunia yang layak dan manusiawi dalam kerangka kerja sama antara bangsa-bangsa.

Pandangan atau presentasi dari peserta Lokakarya

Dalam lokakarya itu pemerintah dari enam negara mempresentasikan konsep mereka tentang mengimplementasikan Tujuan-tujuan Pembangunan Milinium/MDG di negaranya masing-masing dalam kerangka program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Emilia Pires, penasehat Kementerian bidang Perencanaan dan Keuangan Timor Lorosa'e menjelaskan tentang paket perencanaan pembangunan nasional Timor Lorosa'e. Menyinggung tentang kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pires menjelaskan lima persoalan seperti kehidupan masyarakat Timor Lorosa'e yang tidak memiliki tempat tinggal, kerusakan infrastruktur akibat perang, rekonstruksi yang dilakukan dengan PBB, badan-badan internasional dan NGO-NGO, kemajuan substansia dalam rekonstruksi infrastruktur

serta terciptanya proses dan sistem politik dalam admosfir perdamaian. Berbicara tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, dia menjelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional Timor Lorosa'e direncanakan untuk 20 tahun, dimana kerangka kerja dan strategi pembangunan diorientasikan pada setiap lima tahun pembangunan. Agenda utama adalah pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan setiap orang. Mengenai MDG, Pires mengatakan bahwa masyarakat Timor Lorosa'e melalui Xanana Gusmão telah terlibat dalam Millennium Assembly di New York, karena itu MDG merupakan bagian integral peta perjalanan pembangunan Timor Lorosa'e. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah akan mengadakan satu lokakarya tentang MDG yang akan diadakan pada bulan Maret 2003 di Dili.

Pada sesi yang lain, wakil masyarakat sipil dari lima negara, Bangladesh, Timor Lorosa'e, Iran, Sri Lanka, Malaysia dan India serta media cetak dan elektronik diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi.

Sebagian besar media mengatakan bahwa mereka kurang tahu juga kurang tertarik dengan program MDG karena data-data tentang MDG yang dihimpun itu bersifat umum dan sulit disajikan dalam bahasa media. Karena itu, kelompok media itu menyarankan kepada badan-badan PBB untuk membangun kemitraan dengan media dalam pelaksanaan proyek-proyek yang menyentuh kebutuhan masyarakat bawah. Mereka juga meminta kepada PBB untuk lebih terbuka tentang apa yang sedang mereka lakukan dan merealisasikan program-program mereka dalam hal-hal praktis.

Selain memberikan pandangan tentang MDG dan kinerja badan-badan PBB, media Bangladesh juga mengkritik pemerintahnya. Menurut mereka pemerintah Bangladesh tidak memberikan data-data tentang apa yang sedang mereka lakukan juga tidak terbuka kepada media. Karena itu mereka sering meminta data dengan badan-badan internasional. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi media setempat, maka mereka menyeruhkan kepada pemerintah-pemerintah dunia badan-badan PBB dan badan-badan internasional lainnya untuk membangun kemitraan untuk mengidentifikasi, memprogramkan dan melaksanakan persoalan-persoalan masyarakat.

Ada beberapa hal yang ditekankan oleh kelompok masyarakat sipil tentang implementasi program MDG seperti menghimbau kepada negara-negara kaya untuk menghormati hak negara-negara berkembang agar memilih konsep dan model pembangunan yang sesuai dengan kemampuan ekonomi dan sumber daya manusia memberikan kesempatan kepada negara-negara berdaulat untuk merancang perencanaan pembangunan nasionalnya sesuai dengan kebutuhan negaranya, membangun kemitraan global, regional dan nasional antara negara-negara maju dan kaya dengan negara-negara berkembang yang miskin. Mereka juga mengingatkan PBB untuk tidak hanya memberikan gagasan-gagasan yang indah namun gagasan itu harus diimplementasikan seperti apa yang mereka katakan.

Mahfuz Anam, editor senior dari surat kabar Bangladesh *Daily Star* menjelaskan alasan mereka mengapa media tidak menulis tentang MDG: "PBB telah membicarakan tentang pendidikan bertahun-tahun. Ketika saya masih belasan tahun PBB sudah berbicara tentang pendidikan, Dan sekarang, sudah 40 tahun PBB masih berbicara tentang pendidikan. MDG adalah satu proyek bagi PBB itu sendiri karena itu saya tidak mau membuat propaganda itu tujuan itu". ❖

Sebuah tinjauan mengenai Program Dukungan Transisi tahun pertama

Pada konferensi para Donatur di Dili bulan Mei 2002, pemerintah Republik Demokratik Timor Lorosa'e memperkirakan bahwa untuk waktu mendatang akan membutuhkan dana tambahan sekitar US\$30 juta untuk mendanai anggaran belanja tahun pertama. Jumlah ini merupakan dana tambahan terhadap \$42 juta yang dapat dihimpun di dalam negara Timor Lorosa'e. Anggaran belanja tersebut diatas digunakan untuk mendanai kantor-kantor pemerintah, gaji para pegawai negeri sipil dan para pejabat negara. Dana ini juga digunakan untuk membiayai pelayanan pemerintah dan fungsi-fungsinya seperti pertahanan, ketertiban umum, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Juga diprediksikan bahwa selama tahun 2005 sampai 2020 cukup banyak uang yang akan diterima dari hasil eksploitasi kekayaan alam minyak dan gas dari Laut Timor untuk mendanai seluruh anggaran belanja tanpa dukungan dari luar.

Kelompok kerja donatur yang terdiri dari Bank Dunia, Lembaga Keuangan Internasional, Jepang, Portugal, Australia dan Inggris setuju untuk menyatukan pemberian bantuan dana bagi anggaran belanja nasional Timor Lorosa'e melalui sebuah fasilitas yang sama seperti dengan dukungan keuangan dari luar untuk konsolidasi Keuangan UNTAET bagi Timor Lorosa'e (*UNTAET Consolidated Fund for East Timor, CFET*) yang telah mendanai pemerintahan transisi (ETTA/ETPA) (lihat *Buletin LH* Vol. 2 no. 1-2). Kelompok kerja donatur mengusulkan Bank Dunia berperan sebagai pengawas terhadap fasilitas baru yang disebut Program Dukungan Transisi (*Transitional Support Program, TSP*). Sebelum konferensi para donatur, pemerintah Timor Lorosa'e tidak menginginkan Bank Dunia mengendalikan dana tersebut dan Pemerintah Timor Lorosa'e telah meminta PBB untuk mengendalikannya sebagai pengganti Bank Dunia, tetap PBB dan para donatur menolak usulan itu. TSP telah mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2002 beberapa hari setelah Timor Lorosa'e bergabung dengan Bank Dunia.

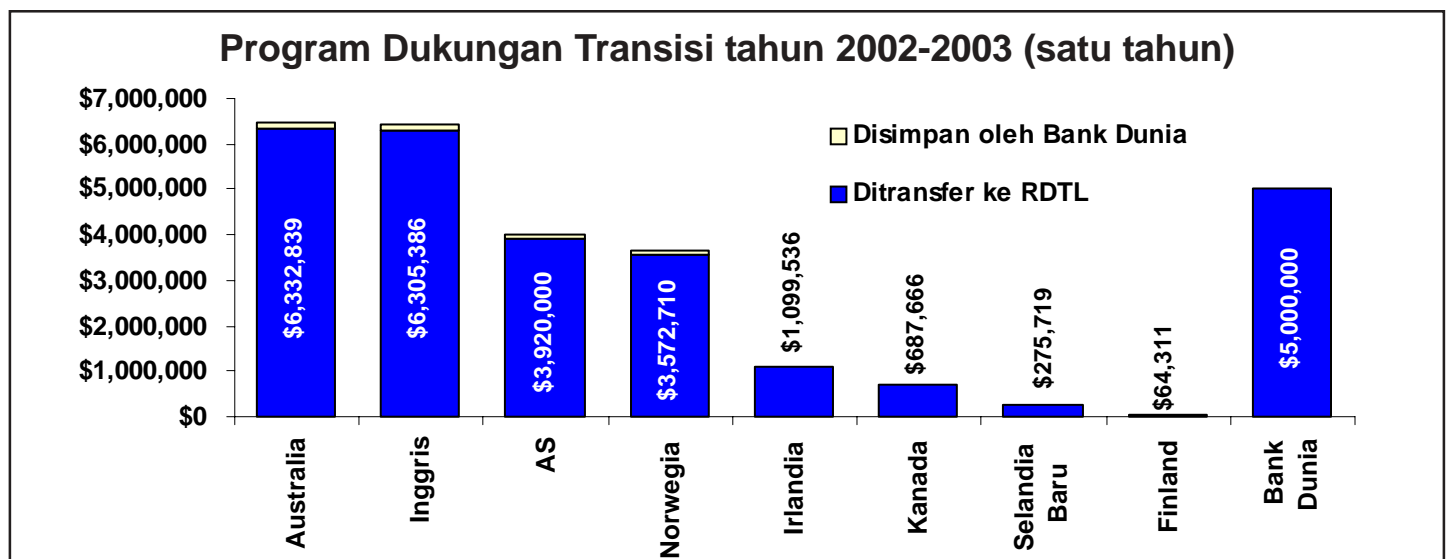
Kelompok kerja para donatur menginginkan pemerintah dan Bank Dunia sepakat tentang bagaimana dana tersebut akan digunakan dan dimonitor. Program ini seharusnya dinegosiasi antara pemerintah, para donatur dan Bank Dunia. Ternyata, pemerintah mengajukan rancangan rencana kegiatan untuk tahun keuangan (Juli 2002 sampai Juni 2003) kepada Bank Dunia. Bank Dunia kemudian memilih bagian-bagian yang dianggap oleh mereka paling penting untuk Program Dukungan Transisi dan menentukan jangka waktu untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dipilih.

Organisasi Internasional mendanai dan mengatur program-program lain di luar anggaran belanja pemerintah. Diantaranya adalah PBB yang mendanai UNPOL dan PKF, dan proyek-proyek antar negara semacam Portugal dalam bidang pendidikan, Jepang dalam bidang pertanian (lihat *Buletin-buletin La'o Hamutuk* Vol 3. no. 2-3, 6, 7, 8). Kesemuanya ini yang dinamakan Sumber Anggaran belanja Bersama [*Combined Sources Budget*]. Pemerintah mengatur anggaran belanja nasional termasuk sektor-sektor pembangunan yang telah diidentifikasi oleh Program Dukungan Transisi dan Bank Dunia seharusnya hanya memonitor bidang-bidang TSP (lihat gambar).

Sebagai pengawas TSP, Bank Dunia menerima dana dari para donatur dan mentransfernya ke pemerintah Timor Lorosa'e. Para donatur telah menyetujui agar Bank Dunia mentransfer dana-dana tersebut pada tanggal-tanggal tertentu. Pemerintah Timor Lorosa'e telah menandatangani sebuah kontrak terpisah dengan Bank Dunia untuk menerima setiap pemberian dari para donatur. Pada saat ini beberapa donatur telah menandatangani persetujuan satu tahun dengan Bank Dunia dan ada beberapa yang lainnya telah menandatangani persetujuan untuk tiga tahun. Bank Dunia telah berusaha agar semua pihak menandatangani persetujuan untuk tiga tahun. Namun pemerintah menolak karena takut Bank Dunia akan mengendalikan dana dengan cara mentransfer uang dalam jumlah kecil dan menunda serta memberhentikan biaya kalau pemerintahan Timor Lorosa'e gagal untuk memenuhi syaratnya. Dana dari setiap donatur ditransfer ketika Bank Dunia menerima dana-dana itu dari donatur.

Portugal tidak menyediakan dana melalui proses TSP tetapi negara itu akan memberikan dana sebesar \$3 juta dolar langsung kepada pemerintah Timor Lorosa'e pada bulan Juni 2003 untuk tahun keuangan 2002-2003. *La'o Hamutuk* telah menghubungi kedutaan Portugal beberapa kali tetapi belum memperoleh alasan mengapa Portugal memilih untuk tidak memberi dana melalui TSP atau apakah mereka menentukan sendiri syarat-syarat mengenai pemberian mereka.

Pemerintah telah terus-menerus meminta agar TSP dapat mentransfer pemberian dana ke anggaran belanja sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah tidak membayangkan bahwa akan ada syarat lebih lanjut. Namun, Bank Dunia telah menentukan syarat-syarat umum: Pemerintah dapat mencairkan dana asal "telah mempertahankan sebuah kebijakan 'makro ekonomi' yang dapat diterima oleh Bank". Bank Dunia mengatakan bahwa kebijakan ini adalah merupakan standar yang



terdapat di dalam persetujuan untuk menghindari perubahan besar dalam kebijakan pemerintah. Juga terdapat larangan keras dari Bank Dunia mengenai pengeluaran atas hal-hal khusus seperti minuman alkohol dan tembakau.

Dari beberapa persyaratan ini ada syarat khusus bagi Timor Lorosa'e yang sudah dipenuhinya pada saat TSP dilaksanakan. Termasuk diantaranya adalah:

- ✓ Menyiapkan anggaran belanja untuk tahun keuangan 2003;
- ✓ Membatasi jumlah pegawai negeri sipil sampai 16,400 orang;
- ✓ Mengalokasi lebih dari 35 persen anggaran belanja nasional untuk kesehatan dan pendidikan dan kurang dari 22 persen untuk pertahanan, hukum dan ketertiban umum;
- ✓ Mempekerjakan tim pengelola swasta untuk Pelayanan Listrik mulai tanggal 20 Mei 2002 sampai 30 Agustus 2002;
- ✓ Mengangkat konsultan untuk menyiapkan syarat-syarat referensi (TOR) dan indikator yang ada untuk pengelolaan kontrak otoritas kelistrikan Timor Lorosa'e.

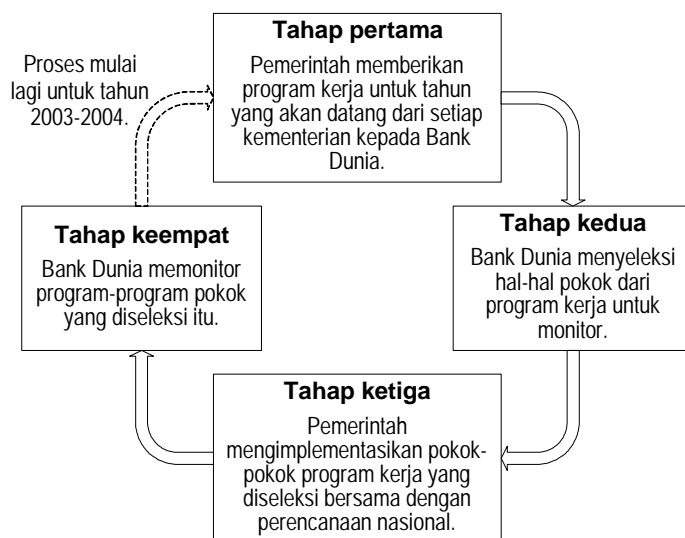
Persetujuan ini juga menyatakan bahwa kalau pemerintah tidak memenuhi syarat-syarat tersebut Bank Dunia berhak memberhentikan transfer uang. Untuk dana yang ada sekarang ini tidak mempunyai kegunaan karena Bank Dunia telah mentransfer dana dalam jumlah yang besar. Namun, hal ini bisa menimbulkan permasalahan dalam dua tahun Program Dukungan Transisi mendatang. Bank Dunia telah mengakui bahwa mereka dapat memberhentikan dana kalau terdapat perubahan kebijakan yang besar.

Pemberian dana untuk Program Dukungan Transisi dijelaskan secara rinci dalam grafika ini. Bank Dunia menyimpan 2% dari semua donatur kepada pemerintah. Pada bulan April 2003 Bank Dunia telah mengambil \$450,000 dan akan menghasilkan sekitar \$1,300,000 selama kurung waktu tiga tahun. Selanjutnya Bank Dunia mengatakan bahwa hal ini merupakan standar untuk semua persetujuan dana perwalian. Para pejabat Bank Dunia yang kami temui tidak bisa memberitahu *La'o Hamutuk* tentang penggunaan dana tersebut. Sebagian dana itu telah disalurkan ke kantor wilayah Bank Dunia Asia Timor dan Pasifik dan sebagian dari dana tersebut bisa disalurkan kembali ke kantor Bank Dunia di Timor Lorosa'e.

Ada beberapa syarat tambahan bagi pemberian dana sebesar \$5 juta dari Bank Dunia untuk pembiayaan Program Dukungan Transis tahun pertama dan dana sebesar \$3 juta untuk tahun kedua. Berdasarkan aturan piagam Bank Dunia, dana ini tidak bisa digunakan untuk 'barang dan pelayanan' dari dalam Timor Lorosa'e, tetapi dananya hanya bisa digunakan dari luar Timor Lorosa'e. Secara praktis hal ini tidak mempunyai dampak karena pemerintah mengimpor barang-barang dari luar yang berharga lebih dari \$5 juta pertahun. Walaupun Bank Dunia mengklaim untuk mempromosikan pengentasan kemiskinan, namun jika hal ini dilakukan tanpa mengeluarkan sebagian dari uang ini di dalam negeri.

Bank Dunia melihat TSP sebagai alat untuk mempengaruhi pembangunan Timor Lorosa'e. Sebuah dokumen internal Bank Dunia bulan April 2002 menyatakan bahwa bantuan keuangan dari Bank Dunia kepada TSP "diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan Bank pada masa depan di negara tersebut. Para donatur sedang mengancam-ancam. Bank untuk lebih berperan aktif dalam merancang dan menegosiasi program untuk periode pasca kemerdekaan, 2002-2003 dan selanjutnya."

Bagaimana Program Dukungan Transisi berjalan



Tahun ini adalah tahun pertama Program Dukungan Transisi. Pemerintah telah menolak usaha Bank Dunia untuk mencampuri anggaran belanja nasional melalui proses negosiasi TSP. Baru-baru ini Bank Dunia merencanakan untuk mengirim sebuah misi penilaian TSP yang terdiri dari pejabat Bank Dunia dan wakil dari para donatur untuk mengevaluasi TSP tahun pertama dan membuat perencanaan untuk program tahun kedua. Pemerintah menolak kedatangan misi tersebut ketika mereka sedang menyiapkan anggaran belanja tahun depan dengan alasan bahwa Bank Dunia akan mencampuri proses pembuatan anggaran belanja dan bukannya menerima bidang-bidang pembangunan yang dipilih oleh pemerintah. Bank Dunia menyetujui untuk menunda misi tersebut dan misi itu tiba pada bulan April 2003 setelah anggaran belanja dirancang. Sejauh ini perencanaan TSP untuk tahun kedua merupakan sebuah proses kerjasama dari tahun pertama.

Di seluruh dunia, Bank Dunia mendukung model pembangunan yang mempromosikan ketergantungan pada ekspor dan investasi asing. Bank Dunia melakukan hal ini dengan cara mempromosikan liberalisasi ekonomi penghapusan pajak impor dan ekspor dan membatasi peraturan pemerintah seperti, gaji dan jam kerja. Bank Dunia juga mendukung privatisasi lembaga pemerintah seperti listrik dan air bersih mengurangi pengeluaran pemerintah dengan cara mendukung rakyat agar membayar pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan. Meskipun kebijakan-kebijakan ini seringkali berbahaya untuk rakyat miskin, lembaga Bank Dunia tidak pernah terbuka untuk ide-ide diluar kerangka kerjanya.

Program Dukungan Transisi adalah program multi-donatur tetapi Bank Dunia menduduki posisi yang sangat kuat sebagai perantara antara para donatur dan Pemerintah Timor Lorosa'e juga berperan sebagai pengawas Dana Perwalian Timor Lorosa'e. Bank Dunia seharusnya sadar bahwa uang yang disalurkan melalui Program Dukungan Transisi bukan uang miliknya. Negara donatur telah menyumbang dana tersebut kepada pemerintah Timor Lorosa'e untuk mendukung prioritas pembangunan dalam anggaran belanja nasional dan Rencana Pembangunan Nasional. Peranan Bank Dunia hanya untuk mentransfer dana itu dari para donatur ke pemerintah Timor Lorosa'e dan memonitor program yang telah disetujui antara para donatur, Bank Dunia dan pemerintah. Bank Dunia seharusnya tidak menyalahgunakan posisinya untuk melaksanakan agendanya sendiri tetapi Bank Dunia harus memenuhi janjinya dan menghargai kemerdekaan Timor Lorosa'e. ❖

Bagaimana Pemerintah Memperoleh Uang dan Menggunakan Uang?

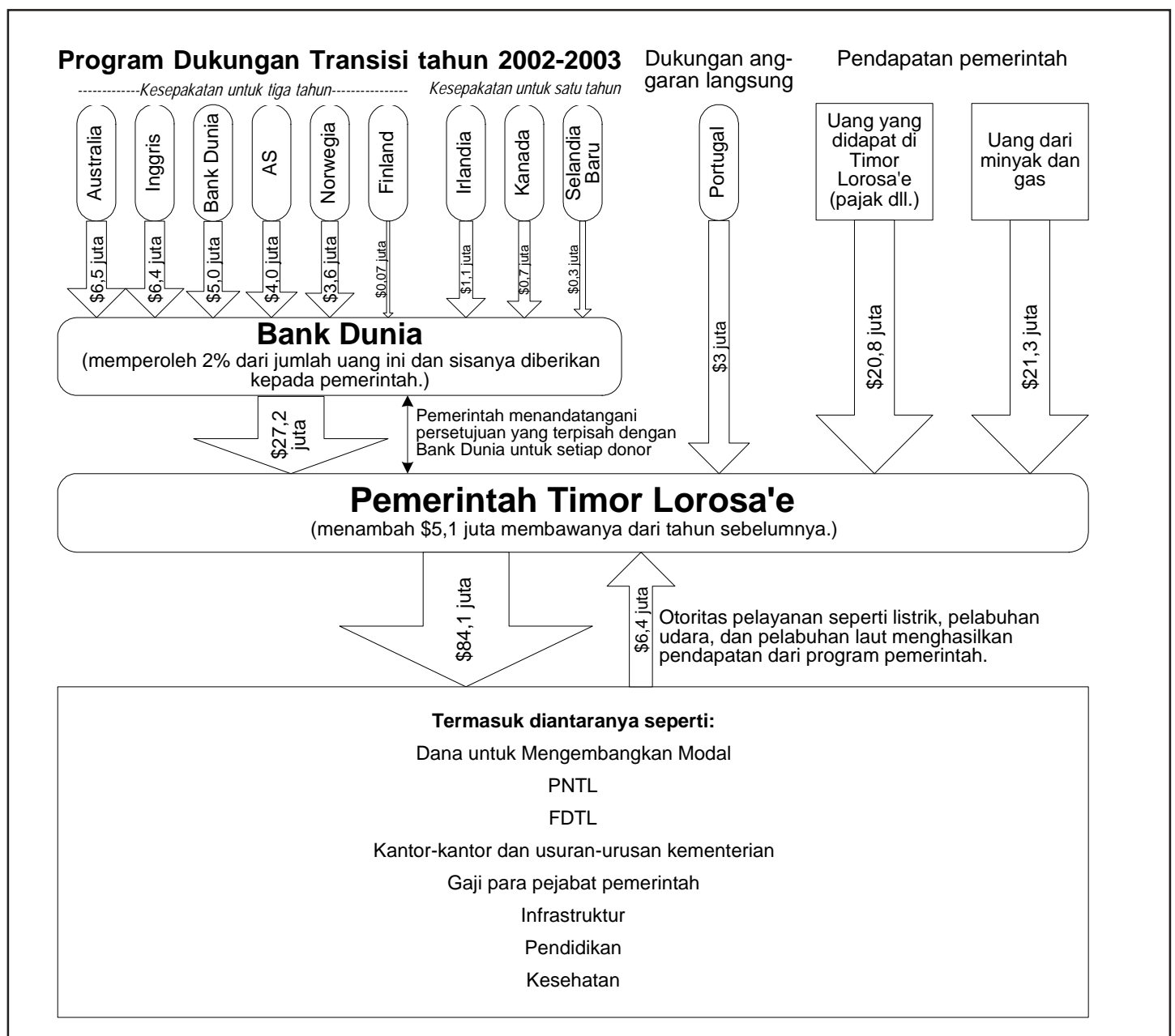
Pemerintah Timor Lorosa'e menerima uang dari:

- ✓ **Bantuan bilateral.** Bantuan ini pada umumnya datang melalui Program Bantuan Transisi yang dikelola oleh Bank Dunia (lihat artikel sebelumnya), meskipun demikian Portugal secara langsung membantu atau memberikan uang kepada pemerintah Timor Lorosa'e dan tidak melalui Bank Dunia.
- ✓ **Pajak dan pendapatan** lain yang didapat oleh pemerintah dari aktivitas-aktivitasnya. Sebagian besar pendapatan ini diperoleh dari pajak pendapatan atau gaji, penjualan, impor dan pajak atas barang.
- ✓ **Pejualan minyak dan gas.** Pendapatan ini diperoleh dari pembangunan minyak dan gas di laut Timor pada tahap pertama dan diperkirakan pendapatan ini akan meningkat dalam tiga sampai empat tahun mendatang. Lihat di diagram di bawah ini.

Data ini diambil dari berbagai sumber namun beberapa angka telah berubah dalam setahun karena itu data ini bukan data yang terbaru atau pasti. Tetapi kami yakin bahwa ini merupakan satu gambaran yang jelas mengenai sumber keuangan Timor Lorosa'e.

Ukuran setiap anak panah menunjukkan berapa banyak uang yang tersedia.

Untuk tahun fiskal 2002-2003, semuanya dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika. Data-data berasal dari laporan mengenai syarat keuangan eksternal untuk jangka menengah (2002-2003) dan juga berasal dari sumber yang lain.



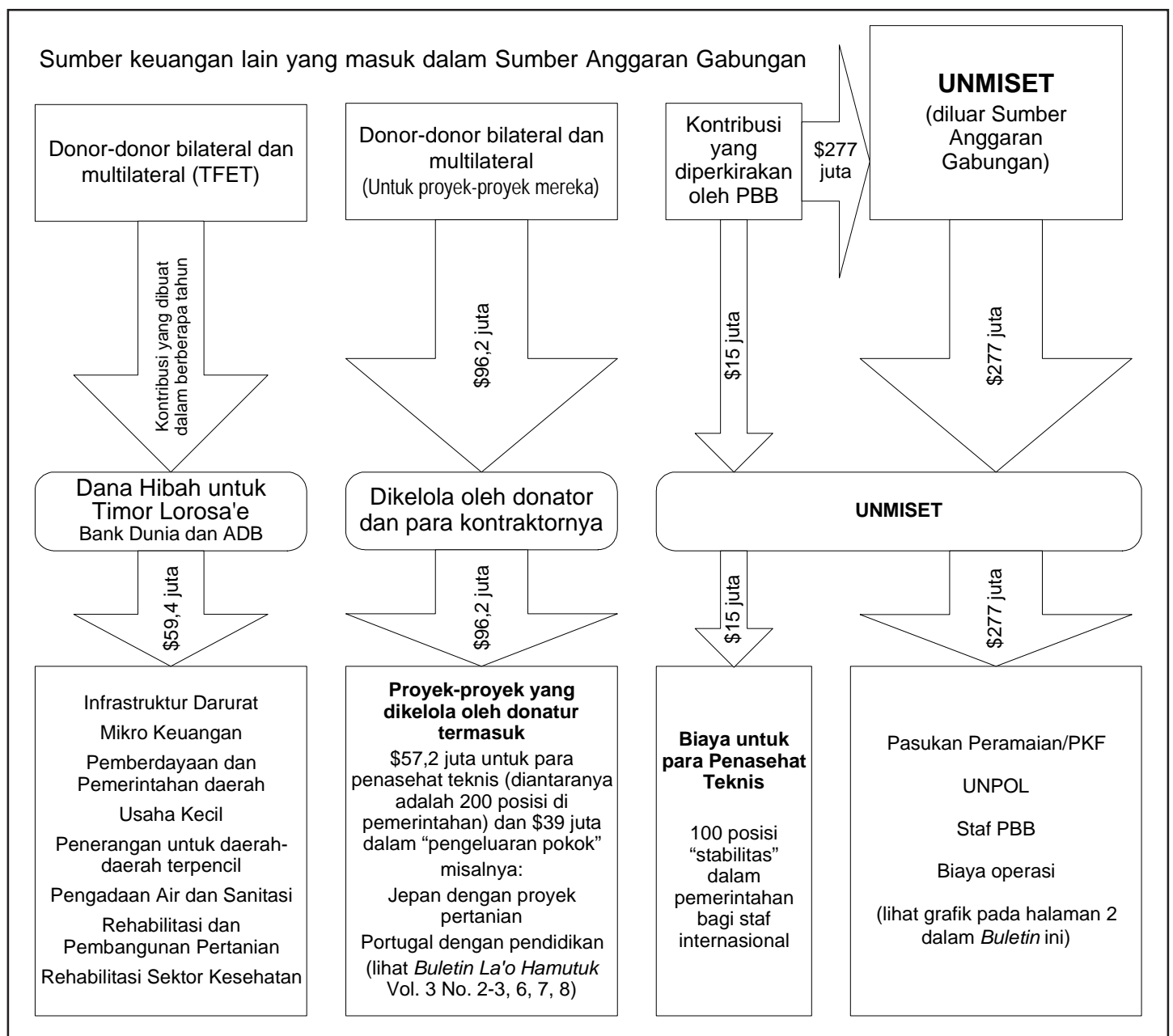
Siapa Saja yang Menggunakan Uang Publik di Timor Lorosa'e?

Disamping program pemerintah Timor Lorosa'e, banyak donator yang membiayai langsung proyek-proyek yang ada di Timor Lorosa'e. Walaupun hal ini tidak dikontrol oleh pemerintah Timor Lorosa'e, dana ini diperhitungkan kedalam sumber anggaran gabungan dan dipertimbangkan dalam program-program perencanaan dan pengalokasian sumber keuangan. Ada empat komponen utama dari sumber anggaran gabungan:

- 1. Anggaran pemerintah RDTL** (lihat halaman sebelumnya): \$72 juta
- 2. Dana Hibah untuk Timor Lorosa'e/TFET** yang didukung oleh banyak donator dan dikelola oleh Bank Dunia dan ADB/Bank Pembangunan Asia. Dana TFET yang sekarang lebih kecil dari TFET pada saat pemerintahan UNTAET. \$58 juta tahun ini.
- 3. Proyek-proyek bantuan secara langsung** dipilih dan dikelola oleh badan-badan seperti UNDP, AusAid, USAid, pemerintah-pemerintah asing dan donator. Tahun ini dana untuk proyek-proyek itu meningkat sampai \$96 juta.
- 4. Sebagian anggaran UNMISSET** – didanai dari iuran yang diprediksikan dari anggota-anggota PBB – membayar penasehat-penasehat internasional yang bekerja dengan pemerintah RDTL, anggaran untuk program itu sebesar \$15 juta.

Sekitar 95% anggaran UNMISSET bukan bagian dari sumber anggaran gabungan. Kami menggambarannya disini sebab dana ini lebih besar dari seluruh pengeluaran public di Timor Lorosa'e. Lihat grafik 2 pada halaman 2.

Untuk tahun fiscal (Juli 2002-Juni 2003) semuanya dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika.



Editorial: Tidak Ada Perdamaian Tanpa Keadilan *(sambungan dari halaman 16)*

tahun lebih walaupun sudah jelas bahwa pemerintahan Indonesia tidak memiliki komitmen untuk mencapai keadilan.

Sejak Oktober 1999 sampai Mei 2004, PBB bertanggung jawab atas keamanan di Timor Lorosa'e dan juga bertanggung jawab atas pengadilan bagi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan serius yang lain. UN- TAET mendirikan Unit Kejahatan Serius (Serious Crimes Unit, SCU) untuk menyelidiki dan menuntut para pelaku dan Pengadilan Khusus (Special Panel, yaitu sebuah pengadilan yang dipimpin hakim internasional serta hakim Timor Lorosa'e) untuk mengadili para terdakwa. SCU dan Pengadilan Khusus masih berada di bawah UNMISSET, didasarkan pada wewenang, pendanaan, staf, dan manajemen PBB, meskipun sekarang mereka bekerja di bawah Jaksa Agung Timor Lorosa'e. Tanpa persetujuan baru, mereka akan dibubarkan pada bulan Juni 2004 ketika misi UNMISSET berakhir.

Sampai akhir 2001, SCU dan Pengadilan Khusus tidak berfungsi dengan baik terutama karena kurangnya dukungan kelembagaan dan kemauan politik dari masyarakat internasional (lihat *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 2 No. 6-7). Sejak Januari 2002, kinerja SCU meningkat, baik dari sisi penyelidikan maupun jumlah dakwaan. Pada bulan Februari 2003, SCU mengeluarkan dakwaan terhadap mantan Menteri Pertahanan Indonesia Wiranto dan perwira-perwira tinggi Indonesia yang lain atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, deportasi dan persekusi sepanjang tahun 1999. Selama empat bulan pertama tahun 2003, SCU telah mengeluarkan dakwaan terhadap 119 orang, sehingga sampai saat ini jumlah terdakwa menjadi 247 orang dalam 60 berkas dakwaan yang berbeda. Dua pertiga (169) dari pelaku-pelaku tersebut masih belum ditahan, dan terus dilindungi oleh Indonesia. Pada saat tulisan ini dibuat, hanya ada 11 surat penahanan yang disebarluaskan secara internasional oleh Polisi Internasional (InterPol).

Dakwaan-dakwaannya tersebut merupakan permulaan yang penting tetapi sepertinya tidak akan menghasilkan sesuatu yang berarti. Pimpinan SCU Siri Frigaard telah mengakhiri masa kontrak kerjanya pada bulan April 2003 dan sampai sekarang belum ada orang yang menggantikannya. Setelah dakwaannya keluar, baik pejabat PBB maupun pejabat pemerintah Timor Lorosa'e tidak mengakui dakwaan tersebut, meskipun kedua-duanya mengakui kemandirian proses peradilan. Namun, kita menerima informasi bahwa pemimpin-pemimpin Timor Lorosa'e tidak mendukung (dan malah menghalangi) usaha dari Jaksa Agung untuk memproses kasus-kasus tersebut. Kementerian Kehakiman Timor Lorosa'e sendiri beranggapan bahwa proses Kejahatan Serius adalah tanggung jawab PBB. Jika salah satu negara anggota Interpol menahan seorang pelaku kejahatan, ada kekhawatiran bahwa pemerintah Timor Lorosa'e tidak akan melakukan negosiasi secara serius untuk mengekstradisi pelaku tersebut agar diadili di sini.

Yang lebih mengecewakan lagi adalah kurangnya dukungan internasional untuk aparat peradilan. Sejak bulan November 2001, Timor Lorosa'e tidak memiliki pengadilan tingkat banding yang berfungsi karena ketidakmampuan pemerintah Timor Lorosa'e dan PBB mencapai kesepakatan untuk menunjuk hakim-hakimnya. Akibatnya beberapa proses pengadilan yang dilakukan oleh Panel Khusus telah

berakhir dan penahanan terhadap para terdakwa yang mengajukan banding sebenarnya telah melampaui standar hak asasi manusia internasional. PBB sebenarnya berencana membuka dua Panel Khusus agar dapat mengadili beberapa kasus pada saat bersamaan, tapi hal itu tidak pernah terwujud. Sejak awal April, PBB bahkan tidak mampu membuka satu panel pun karena kekurangan hakim internasional. Selama dua tahun terakhir kira-kira 30 terdakwa sudah dihukum oleh Panel Khusus (termasuk delapan yang masa menunggu naik banding), tetapi sebagian besar telah menyatakan bersalah. Dalam setiap perkara di mana terdakwa tidak menyatakan bersalah, proses pengadilan berlanjut selama beberapa bulan. Dengan sisa waktu sekitar setahun, berapa dari 40 terdakwa yang sedang menunggu proses peradilan, apalagi 169 orang yang bersembunyi di Indonesia, akan menghadapi pengadilan?

Setelah tertunda berbulan-bulan Hakim Cláudio de Jesus Ximenes dilantik sebagai ketua pengadilan banding, yang semestinya disusul pelantikan hakim-hakim banding yang baru. Tetapi kontraknya dengan UNMISSET hanya berjangka enam bulan, dan pengangkatannya dengan gaji internasional (Cláudio adalah orang Timor Lorosa'e yang bekerja sebagai hakim di Portugal selama 21 tahun) menyinggung perasaan orang lain dalam sistem peradilan. Setelah UNMISSET keluar dari Timor Lorosa'e, siapa yang akan membayar gajinya?

Kinerja yang kurang dari pengadilan PBB di sini dilengkapi dengan keengganan pemerintah Timor Lorosa'e dan komunitas internasional untuk menegakkan keadilan. Pada bulan April, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengakui bahwa "hubungan antara Indonesia dan Timor Lorosa'e akan ditingkatkan apabila para terdakwa di kedua negara tersebut yang dituduh atas kejahatan serius pada tahun 1999 dapat diadili; sekali lagi, komitmen politik dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu." Tetapi dia menyadari bahwa "proses peradilan tidak akan selesai sebelum bulan Juni 2004 ... Komitmen politik yang kuat sungguh penting. ... Adalah penting bahwa dakwaan-dakwaannya terhadap kejahatan serius itu harus dihargai, baik karena prinsip maupun untuk memberi teladan, dan para pelaku juga harus menghadapi proses pengadilan."

Namun kata-kata tegas dari Sekretaris Jenderal ini tidak sejalan dengan apa yang dilakukan PBB di Timor Lorosa'e. Pada April 2000 Indonesia berjanji untuk bekerjasama dengan proses peradilan di Timor Lorosa'e, tetapi janji itu tidak pernah dipenuhi. UNTAET tidak pernah mendorong komunitas internasional agar menekan Jakarta, dan Indonesia pun tidak merasa perlu melakukan sesuatu.

Selama tiga tahun terakhir, komunitas internasional menunggu hasil pengadilan hak asasi manusia ad hoc Indonesia dan menjadikan proses peradilan semu ini sebagai alasan untuk tidak mengambil tindakan sendiri. Setelah penundaan yang lama dan sekian banyak kesalahan prosedur, proses pengadilan ad hoc di Jakarta hampir berakhir. Para jaksa dan hakim memandang para pelaku sebagai warga negara Indonesia yang setia, yang berusaha memberantas pemberontakan di provinsi. Sebagian besar pelaku hanya dituduh gagal menghalangi kejahatan yang dilakukan oleh orang Timor terhadap orang Timor yang lain. Sebelas dan empat belas terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Lima terdakwa yang dijatuhi hukuman (termasuk dua orang Timor

Lorosa'e) mendapat vonis ringan, sementara empat orang divonis di bawah batas minimum secara hukum. Proses pengadilan ini begitu bermasalah sehingga Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang pro-Indonesia pun menyatakan "kekecewaannya terhadap cara pengadilan itu dijalankan". Tetapi komisi itu – yang terus berkhayal dan membelokkan perhatian dari keadilan sejak 2000 – "terus mendukung pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memperbaiki proses hukum secara transparan, untuk memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan."

Sudah jelas bahwa Indonesia tidak pernah bermaksud menegakkan keadilan dan justru sebaliknya melindungi para pejabat militer dan sipil dari tanggung jawab di hadapan pengadilan di Jakarta maupun Dili. Hal ini jelas pula bagi para pengambil keputusan di Jakarta, Dili, New York dan ibukota negara-negara anggota PBB. Dengan berpura-pura tidak melihat kenyataan tersebut dan tanpa mengambil langkah berarti untuk mencapai keadilan, komunitas internasional sebenarnya terus terlibat dalam kejahatan yang dilakukan Indonesia dan menghalangi usaha masyarakat Timor Lorosa'e untuk keluar dari posisi sebagai korban dan membangun kembali kehidupan dan negerinya.

Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) sering digambarkan sebagai salah satu bagian dari proses hukum. Dengan mendukung CAVR, donor dan pemerintah asing mengalihkan perhatian dari ketidakrelaannya sendiri untuk mendukung keadilan. Program-program CAVR, termasuk pencarian kebenaran, catatan pernyataan para korban, pendidikan publik, dan rekonsiliasi komunitas memang berguna tetapi usaha-usaha ini tidak ada kaitannya dengan keadilan. CAVR tidak bisa menuntut tanggung jawab dari ribuan orang yang melakukan kejahatan serius. Laporan Kebenaran CAVR akan mengkaji informasi penting mengenai kejahatan-kejahatan Indonesia di Timor Lorosa'e – meskipun semua orang di sini sudah mengetahui bahwa pendudukan militer Indonesia secara tidak sah telah mengakibatkan kematian 200.000 orang Timor Lorosa'e dan pemerkosaan serta penyiksaan banyak orang dan dakwaan-dakwaan yang telah dikeluarkan oleh Unit Kejahatan Serious telah menyebut banyak fakta tentang kejadian pada tahun 1999.

Pada saat Laporan Kebenaran diterbitkan oleh CAVR pada akhir tahun 2004, Unit Kejahatan Serious dan Tribunal Khusus telah dibubarkan. Dukungan internasional baik secara finansial maupun organisasi yang ada pada saat ini untuk keadilan akan habis; kemauan politik mungkin akan hilang juga. Laporan CAVR akan berguna untuk peneliti dan ahli sejarah yang meneliti Timor Lorosa'e tetapi tidak akan membantu mengakhiri impunitas para pelaku.

Selama dua tahun terakhir, Presiden Timor Lorosa'e dengan dukungan pejabat-pejabat pemerintah yang lain, sering menyatakan bahwa pemerintah Timor Lorosa'e tidak bisa memimpin usaha untuk menuntut keadilan. Menurut dia, hubungan baik Timor Lorosa'e dengan Indonesia dan pemimpin-pemimpin milisi (serta para pengungsi yang masih hidup di bawah kontrolnya) harus diutamakan ketimbang proses pengadilan bagi penjahat-penjahat kelas kakap. Kami memahami pemikiran Presiden Timor Lorosa'e ini namun pendekatan ini – yaitu mengutamakan pengakuan dan rekonsiliasi untuk ikan kelas teri sementara ikan kelas kakap berjalan secara bebas – tidak memenuhi tuntutan atas keadilan dan tidak melayani kepentingan masyarakat Timor Lorosa'e itu sendiri. Menyalahkan para korban dari kejahatan-kejahatan Indonesia – baik yang ditindas maupun dimanipulasi supaya menindas yang lain – tidak akan membantu mereka yang menderita agar bisa maju dalam kehidupannya. Kekebalan hukum bagi penjahat kelas kakap (para pelaku utama) hanya akan memberi peluang kepadanya dan pengikutnya untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di seluruh Indonesia dan malah di belahan muka bumi lainnya.

La'o Hamutuk setuju bahwa komunitas internasional adalah pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas keadilan dan kami mengulangi seruan kami untuk membentuk pengadilan internasional bagi Timor Lorosa'e dan meningkatkan tekanan agar Indonesia bekerjasama dengan proses penanganan Kejahatan Serious di sini. Kami juga menyerukan agar ada dukungan internasional untuk pengadilan Khusus di sini, dalam bentuk hibrida (campuran) antara pihak internasional dan Timor Lorosa'e dengan yurisdiksi universal sampai semua terdakwa di sini dapat diadili. Kami menyampaikan seruan ini kepada seluruh komunitas bangsa – mulai dengan Australia, Amerika Serikat, Britania Raya, Jepang, dan lainnya yang dulu mendukung pendudukan Indonesia di Timor Lorosa'e. Namun, pemerintah dan parlemen Timor Lorosa'e juga harus mendukung keadilan secara tegas, dan bukan justru menghalanginya.

Seruan kami digemakan oleh sebagian besar warga Timor Lorosa'e dan juga oleh gerakan solidaritas internasional, termasuk orang-orang di Indonesia. Kami mengajak mereka bekerjasama untuk menekan pemerintah kami dan pemerintah mereka supaya tuntutan keadilan bagi kejahatan terhadap kemanusiaan tidak diabaikan.

Masa kerja misi PBB di Timor Lorosa'e tinggal satu tahun. Bukan saatnya lagi untuk menunda-nunda sambil main politik. Jika ada kemauan politik, keadilan bisa tercapai. Jika tidak, masyarakat Timor Lorosa'e tidak pernah akan mencapai kedamaian. ❖

Siapa itu La'o Hamutuk?

Staf La'o Hamutuk: Cassia Bechara, Simon Foster, Tomas (Ató) Freitas, Mericio (Akara) Juvinal, Yasinta Lujina, Inês Martins, Adriano do Nascimento, Charles Scheiner, João Sarmento, Jesuina (Delly) Soares Cabral, Andrew de Sousa

Gambar: Cipriano Daus

Penerjemah: Douglas Kammen, Johanna Maria, Pamela Sexton, Kylie

Dewan Penasehat: Maria "Micato" Domingas Alves, Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno "Cailoro" Rodrigues, Aderito de Jesus Soares

Editorial: Tidak Ada Perdamaian Tanpa Keadilan

Bulan Mei 2003 menandai satu tahun kemerdekaan Timor Lorosa'e, dan sekaligus satu tahun sebelum berakhirnya Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mendukung Timor Lorosa'e (UNMISSET). Kekuasaan militer Indonesia dan milisinya yang penuh teror berakhir tiga setengah tahun yang lalu, tetapi tidak banyak kemajuan dalam menuntut tanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan. *La'o Hamutuk* khawatir mereka akan bebas dari hukuman karena baik komunitas internasional maupun pemerintahan Timor Lorosa'e tidak mempunyai *political will* (kemauan politik) untuk menuntut pihak Indonesia dan para pemimpinnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan.

Keadilan adalah masalah yang rumit. Dan masalah ini bertambah rumit karena pada kenyataannya tetangga terbesar Timor Lorosa'e masih mengingkari tanggung jawab atas invasi tahun 1975, pendudukan selama seperempat abad dan kebijakan membumi hanguskan Timor Lorosa'e pada tahun 1999. Timor Lorosa'e harus hidup bersama dengan Jakarta dan Republik Indonesia adalah anggota PBB serta bangsa beragama Islam terbesar di dunia dan sekaligus penguasa ekonomi di wilayahnya.

Namun sayangnya, keadilan di Timor Lorosa'e mungkin akan menjadi korban terbaru dari keinginan negara-negara barat dan Australia untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Bulan lalu, atas persetujuan pemerintah Timor Lorosa'e Komisi Hak Asasi Manusia PBB menutup kasus pelanggaran HAM Indonesia dari agendanya. Anggota PBB kemudian mengangkat Indonesia sebagai anggota Komisi HAM untuk periode tiga tahun mendatang dan Australia mengusulkan agar Indonesia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kemauan politik internasional untuk mengakhiri kekebalan hukum yang sejak awal memang terbatas nampaknya semakin cepat menghilang.

Para korban dari kejahatan Indonesia di Timor Lorosa'e – hampir seluruh masyarakat Timor Lorosa'e – menuntut agar pemerintah kita dan komunitas internasional berjuang untuk mencapai keadilan tetapi tuntutan tersebut tidak diterima dengan baik oleh para penguasa. Kita menyadari bahwa Timor Lorosa'e membutuhkan perbatasan yang damai dan hubungan baik dengan negara tetangga demi kepentingan jangka panjang kedua belah pihak. Tetapi melindungi jenderal-jenderal yang melakukan kejahatan – walaupun jenderal-jenderal tersebut masih berkuasa pada saat ini – tidak melayani warga negara baik di Indonesia maupun di Timor Lorosa'e. Malah sebagian dari perwira kriminal TNI sudah menerima kenaikan pangkat selanjutnya mereka masih menteror masyarakat di Aceh, Papua dan wilayah yang lain.

Sementara demokrasi berkembang di Timor Lorosa'e dan Indonesia, tegaknya hukum [rule of law] dan supremasi sipil atas militer harus didukung pada setiap kesempatan. Timor Lorosa'e membutuhkan hubungan baik dengan 235 juta warga negara Indonesia bukan segelintir perwira tinggi dan penjahat Orde Baru.

Tanggung jawab utama untuk keadilan berada di tangan PBB dan masyarakat internasional. Kejahatan-kejahatan ini melanggar Piagam PBB dan resolusi-resolusi Dewan

Keamanan PBB sejak 1975. Pada tahun 1999, kejahatan-kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosa'e secara langsung bertentangan dengan kesepakatan antara Indonesia, PBB dan Portugal. Komunitas internasional harus bertanggung jawab atas keadilan tetapi harus didukung secara penuh oleh pemerintah Timor Lorosa'e (dan sebaiknya oleh Indonesia juga). Kami sangat kecewa karena ketiga pihak ini sedang menghindari tuntutan atas keadilan.

Penyelidikan awal yang dilakukan oleh Indonesia dan PBB terhadap kekerasan yang terjadi pada 1999 menyebut nama-nama perwira tinggi militer dan pejabat pemerintah dan mengusulkan pembentukan sebuah pengadilan internasional. Kami yakin bahwa sebuah pengadilan internasional harus didasarkan pada kemauan politik untuk memaksa kerja sama dari Indonesia adalah pilihan yang terbaik. Tetapi negaradi dunia ini tidak mau mengambil tindakan tegas menghadapi pemerintahan Indonesia malah memberi kesempatan kepada Jakarta untuk mengadili sendiri para pelaku kejahatan itu. Negara-negara ini terus menonton dan menunggu selama tiga

(Bersambung ke halaman 14)

Apa itu La'o Hamutuk?

La'o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor Lorosa'e yang memantau, menganalisis, dan melapor tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor Lorosa'e harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor Lorosa'e yang efektif. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor Lorosa'e. Staf *La'o Hamutuk* baik itu staf Timor Lorosa'e maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji dan tunjangan yang sama. Terakhir, *La'o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosa'e dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La'o Hamutuk mengharapka Anda menghubungi kami jika anda mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapat perhatian rakyat Timor Lorosa'e serta masyarakat internasional.